

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Pengertian Korupsi	20
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
3. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	26
B. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.....	37

C.	Eksekusi Putusan Perkara Pidana	43
1.	Pengertian Putusan	43
2.	Jenis-Jenis Putusan Perkara Pidana	47
a.	Putusan Sela	48
b.	Putusan Akhir	50
1)	Putusan Bebas	50
2)	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	53
3)	Putusan Pemidanaan	54
3.	Syarat Sah Putusan	55
4.	Eksekusi Putusan Perkara Pidana	56

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	61
B.	Bahan Penelitian	65
C.	Lokasi dan Subjek Penelitian	67
D.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	69
E.	Jalannya Penelitian	70
F.	Analisis Data	71
G.	Kendala Penelitian	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Faktor-Faktor Penghambat Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	74
----	--	----

1.	Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Belum Diterima Oleh Jaksa	74
2.	Perlawanan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Benda Yang Disita Oleh Jaksa	78
3.	Terpidana Tidak Membayar Uang Pengganti	81
4.	Terpidana Lebih Memilih Menjalankan Pidana Penjara Pengganti ..	87
5.	Kejaksaaan Kesulitan Dalam Pencarian Harta Benda Terpidana	92
B.	Kebijakan Yang Sebaiknya Ditempuh Untuk Mengoptimalkan Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang	96
1.	Diaturnya Jangka Waktu Penyerahan Salinan Putusan Kepada Jaksa ..	96
2.	Menerapkan Pidana Penjara Pengganti Bagi Terpidana Yang Tidak Mampu Membayar Uang Pengganti	99
3.	Menuntut Subsider Pembayaran Uang Pengganti Dengan Pidana Penjara Yang Tinggi	107
4.	Membentuk Unit Khusus Dalam Pencarian Harta Benda Terpidana Pada Kejaksaan Negeri	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	114
1.	Faktor-faktor penghambat eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.....	114

2. Kebijakan yang sebaiknya ditempuh untuk mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dimasa mendatang	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
INDEKS ISTILAH.....	122
INDEKS SUBYEK	124
GLOSARIUM.....	127